

**Penentuan rekomendasi kelayakan tahap verifikasi administrasi
radio swasta di sekretariat kpip provinsi jawa tengah menggunakan
metode AHP**

JODI DAMARDANA

*Program Studi Sistem Informasi - S1, Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Dian Nuswantoro Semarang
URL : <http://dinus.ac.id/>
Email : jodydamardana@yahoo.com*

ABSTRAK

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari Negara (melalui KPID) untuk memberikan penilaian (evaluasi) apakah sebuah lembaga penyiaran layak untuk diberikan atau layak meneruskan hak sewa atas frekuensi. Dengan kata lain perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik. Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, yakni dimulai persyaratan teknis, format siaran, permodalan. Pemberian dan perpanjangan ijin penyelenggara penyiaran akan diberikan oleh Negara setelah memperoleh masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPID, rekomendasi kelayakan penyelenggara penyiaran dari KPID, hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPID dan pemerintah atas usul KPID. Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni izin sementara dan izin tetap. Sebelum memperoleh izin tetap penyelenggara penyiaran lembaga penyiaran wajib melalui masa uji coba siaran paling lama 6(enam) bulan. Pembangunan dan penggunaan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk penentuan rekomendasi kelayakan tahap verifikasi administrasi ini dapat menjadi alternatif lain untuk membantu memudahkan dan mempercepat pengelolaan data yang dapat menghasilkan keputusan secara cepat dan akurat mengenai rekomendasi kelayakan.

Kata Kunci : decision support systems, licensing, kpip, recommendation feasibility, administrative verification

**Determination of eligibility verification phase on administrative
secretariat KPID private radio station in the province of Central Java
using AHP**

JODI DAMARDANA

*Program Studi Sistem Informasi - S1, Fakultas Ilmu Komputer,
Universitas Dian Nuswantoro Semarang
URL : <http://dinus.ac.id/>
Email : jodydamardana@yahoo.com*

ABSTRACT

Licensing is the main node of the regulation of broadcasting. In a series of recycling process of broadcasting regulation, licensing a stage decision of the State (through KPID) to provide an assessment (evaluation) is a broadcasting institution deserves to be given a decent forward or lease rights over frequency. In other words, licensing also be the responsibility of controlling the instrument continuously and periodically so that any broadcasters do not stray from the ministry of information to the public. In the licensing system set up various aspects of the requirements, which begins the technical requirements, the format of the broadcast, the capital. Granting and renewal of broadcasting licenses will be awarded by the organizers of the State after obtaining input and hearing evaluations between the applicant and KPID, on the feasibility of organizing broadcasting from KPID, the agreement in a joint meeting of the forum held exclusively for licensing between the proposal and the government KPID KPID. The granting of licenses carried out in stages, ie temporary licenses and permits remain. Before obtaining broadcasting licenses remain operator obligatory broadcasters broadcast through the trial period longer than 6 (six) months. Development and use of decision support system applications for determination on the feasibility of the verification phase of this administration may be another alternative to help facilitate and accelerate the management of data that can produce quick and accurate decisions regarding eligibility recommendation.

Keyword : decision support systems, licensing, kpid, recommendation feasibility, administrative verification